

Analisis Kurikulum Berbasis Anti Korupsi di Indonesia: Sistematika Literature Review

Abdul Sakban¹, Dasim Budimansyah², Cecep Darmawan³, Syaifullah⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

abdul.sakban24@upi.edu¹, budimansyah@upi.edu², cecep darmawan@upi.edu³, syaifullah@upi.edu⁴

Keywords:

Anti-Corruption,
Development,
Indonesian Curriculum.

Abstract: Indonesia is a country that has experienced curriculum changes, but these curriculum changes do not guarantee better quality of education. The purpose of this article is to identify the development of the curriculum in Indonesia and the integration of anti-corruption-based curriculum in the Anti-Corruption Education course. This research method includes systematic literature review. There are 40 articles as samples with data collection criteria. Data analysis uses data reduction, data tabulation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the curriculum in Indonesia has changed 11 times with the hope and aim of improving the quality of education, especially in human resources. The integration of anti-corruption-based curriculum in the Anti-Corruption Education course can use various active learning models such as Problem-based learning models, Project-based learning models, cooperative learning models, service learning models, and Value-based learning models. Anti-corruption values that can be instilled in students are honesty, responsibility, simplicity, freedom, integrity and morality.

Kata Kunci:

Anti Korupsi,
Perkembangan,
Kurikulum Indonesia.

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang mengalami perubahan kurikulum, namun perubahan kurikulum tersebut tidak tidak menjamin kualitas pendidikan lebih baik. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan kurikulum di Indonesia dan integrasi kurikulum berbasis anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Metode penelitian ini termasuk sistematika literatur review. Terdapat 40 artikel sebagai sampel dengan kriteria pengumpulan data. Analisis data menggunakan reduksi data, tabulasi data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia mengalami pergantian sebanyak 11 kali perubahan dengan harapan dan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada sumber daya manusia. Integrasi kurikulum berbasis anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dapat digunakan berbagai model pembelajaran aktif berupa model Problem based learning, model Project based learning, model cooperative learning, model service learning, dan model Value based learning. Nilai-nilai anti korupsi yang dapat di tanamkan kepada peserta didik adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan, integritas dan moralitas.

Article History:

Received: 18-08-2024

Online : 29-08-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang mengalami perubahan dan pengembangan kurikulum sebanyak 11 kali selama kurang lebih 77 tahun, namun perubahan kurikulum tersebut tidak tidak menjamin kualitas pendidikan lebih baik. Secara historis perubahan kurikulum diantaranya dimulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975,

kurikulum 1984 (kurikulum CBSA), kurikulum 1994, kurikulum 2004 (KBK), kurikulum 2006 (KTSP), hingga kurikulum 2013 (F. Wahyuni, 2015), dan kurikulum Merdeka 2020 (Retnaningrum et al., 2023). Namun hasil penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 menunjukkan menempatkan peringkat Indonesia berada pada 39 dari 41 negara (OECD, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia belum mampu bersaing dengan negara-negara tetangga Malaysia, Thailand, China, Jepang, Finlandia, Jerman, Amerika Serikat dan negara Eropa. Peningkatan kualitas pendidikan di negara maju seperti Amerika Serikat menerapkan sistem pendidikan dengan pendekatan berlapis di mana siswa belajar satu tahun tentang ruang angkasa, diikuti dengan kimia, fisika, dan ilmu sosial lainnya (Campbell-Phillips, 2020).

Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis, karena kurikulum dijadikan sebagai pedoman guru/pendidik dalam melaksanakan pembelajaran atau dalam proses pengajaran. Kurikulum merupakan sarana yang sangat penting bagi keberhasilan tujuan pendidikan, karena kurikulum yang tepat akan memudahkan tercapainya tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 bahwa: "Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu". Dalam mencapai tujuan pendidikan, kurikulum harus diwujudkan atau dipraktikkan dalam kegiatan pendidikan melalui pengajaran. Pengajaran berdasarkan kurikulum yang telah ditentukan, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kurikulum dan pengajaran merupakan dua hal yang harus saling melengkapi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan pendidikan. Isi kurikulum atau pengajaran tidak hanya terdiri dari kumpulan pengetahuan atau kumpulan informasi saja, melainkan suatu pengetahuan yang terpadu dan diperlukan, baik bagi pengetahuan itu sendiri maupun bagi siswa dan lingkungannya. Ada empat hal penting dalam proses Pendidikan (Agustin, 2019): (1) peran struktur materi dan bagaimana menjadi pusat pembelajaran, (2) proses pembelajaran menekankan pada pemikiran intuitif, (3) kesiapan dalam belajar, dan (4) dorongan untuk belajar dan bagaimana membangkitkan motifnya.

Kurikulum sebagai alat pendidikan untuk mencetak generasi muda dan memiliki tujuan pendidikan yang harus tercapai. Kurikulum di Indonesia perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampaknya (Andrian et al., 2018; Muhammad & Nugraheni, 2022), kurikulum diintegrasikan sebagai model pendekatan pendidikan untuk menghadapi tantangan kehidupan abad ke-21 (Akib et al., 2020), peninjauan kurikulum, reformasi kurikulum sebagai perbaikan pada kurikulum sebelumnya (Lie, 2007), perubahan kurikulum baru membutuhkan waktu untuk dapat meningkatkan sumber daya melalui pelatihan (Suyanto, 2017), kurikulum memiliki komponen seperti kompetensi lulusan. Standar, kompetensi inti, kompetensi dasar dan buku teks, untuk mencapai pemahaman konseptual, kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan pembelajaran integratif yang menekankan pada kondisi pembelajaran bermakna (Widiyatmoko & Shimizu, 2018). Selain itu, pergantian dan penghentian kurikulum bukanlah paradigma utama melainkan dunia pendidikan harus dikembalikan untuk mencerdaskan bangsa secara hakiki. Dalam setiap waktu ada kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zamannya dan yang lebih penting lagi adalah setiap kurikulum harus mengembalikan sistem pendidikan siswa sebagai taman yang menyenangkan dan menempatkan peran orang tua sebagai guru (Nugraheni, 2015; Parker, 2018; Saud & Johnston, 2006). Kurikulum eksklusif harus direformasi untuk mewujudkan kurikulum inklusif yang terdiri dari enam komponen antara lain pengembangan berbagai perspektif sejarah, pengembangan kesadaran budaya, pengembangan kompetensi antar budaya, pemberantasan rasisme, seksisme, dan segala bentuk prasangka dan diskriminasi, peningkatan kesadaran akan keadaan negara. Reformasi kurikulum eksklusif dan inklusif, dapat menggunakan model ASPIRE (Assessment, Synthesis, Planning, Implementation, Review, and Evaluation) (Mukminin et al., 2019). Model ASPIRE memfasilitasi pimpinan sekolah untuk melibatkan seluruh pelaku sekolah (staf sekolah, keluarga, masyarakat, wali, dan siswa)

untuk mengembangkan kurikulum inklusif yang melayani berbagai tuntutan siswa dari berbagai latar belakang sehingga mereka berhasil secara akademis dan sosial di dalam dan di luar sekolah.

Kurikulum sebagai substansi dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid disekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Suatu kurikulum juga dapat merujuk pada suatu dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal dan evaluasi. Kurikulum sebagai sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja untuk menyusun suatu kurikulum serta melaksanakan, mengevaluasi dan menyempurnakannya. Kurikulum sebagai suatu bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Tujuan kurikulum sebagai suatu bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum (Bullough Jr et al., 1984). Namun kenyataannya bahwa kurikulum di Indonesia tidak menggunakan kajian mendalam dengan aspek pada kurikulum sebagai substansi, sistem dan program studi. Justru yang terjadi adalah melakukan perubahan kurikulum memiliki aspek politik dan ekonomi.

Berdasarkan berbagai literatur menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia tergolong beragam makna maupun tanggapan dalam menerima maupun menerapkan kurikulum di sekolah atau kampus. Gunawan (2017) menyatakan bahwa kurikulum secara substansi belum sesuai standar nasional Pendidikan sehingga menimbulkan multitafsir terutama konten pembelajaran, Subkhan (2019) menyatakan kurikulum adalah produk hukum bukan produk akademis dan kurangnya tradisi intelektual dalam perguruan tinggi keguruan menjadi faktor utama mengapa kajian kurikulum tidak dapat berkembang secara optimal dalam konteks Indonesia. Lainnya menyatakan bahwa mutu pendidikan dapat menekan laju inflasi pendidikan, artinya pendidikan tidak hanya ditujukan untuk pemenuhan tenaga kerja industri saja. Namun juga untuk memajukan dan mengembangkan dunia industri yang memberikan efek domino terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan (Rusdian et al., 2023), tujuan kurikulum berkisar pada pengetahuan dan keterampilan (Ridha & Kamil, 2021), Sudirman & Haling (2020) menyatakan permasalahan yang muncul yaitu guru kurang percaya diri dalam menyelesaikan silabus, guru mengalami hambatan dalam pengembangan kompetensi dasar, secara operasional, isi buku ajar kurang sesuai dengan kurikulum, guru belum menguasai mata pelajaran dan kurang memahami tentang penilaian yang diterapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, kurikulum di Indonesia perlu dilakukan pengkajian dan dianalisis dalam aspek substansi kurikulum dan perubahan kurikulum sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan. Dalam mengkaji kurikulum diperlukan kajian perkembangan kurikulum, struktur kurikulum dan outcome kurikulum yang telah diterapkan untuk mengetahui dampak positif dan negative terhadap kualitas pendidikan. Tolak ukur pendidikan berkualitas setidaknya memenuhi target yang termuat pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian tujuan dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan kurikulum di Indonesia dan perubahan kurikulum Indonesia sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Pengembangan teori kurikulum yang bersifat ilmiah memiliki tiga sumbangan filsafat dalam teori kurikulum yaitu merumuskan dan mempertimbangkan tujuan pendidikan, memilih dan menyusun bahan, perumusan bahasa khusus kurikulum (B. O. Smith & Orlosky, 1975). Demikian juga Macdonald (1971) menegaskan bahwa teori kurikulum dalam model sistem dalam persekolahan yaitu kurikulum, pengajaran (instruction), mengajar (teaching) dan belajar. Jadi kurikulum sebagai instrument pengajaran, mengajar dan belajar dengan mempertimbangkan aspek bahan pembelajaran, output lulusan dan tujuan pendidikan nasional.

B. METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka terhadap dokumen-dokumen dari jurnal, prosiding, tesis, dan tesis dengan sumber data yang sudah dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan perkembangan kurikulum di Indonesia. Data yang tersebar kemudian diambil dari 40 artikel sebagai sampel dengan kriteria pengumpulan data dari sekolah negeri dan swasta yang menerapkan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pengumpulan data menggunakan observasi dan analisis document secara mendalam. Analisis data menggunakan pengumpulan data lapangan atau reduksi data, selanjutnya tabulasi data sangat penting dilakukan untuk menganalisis secara tepat, kemudian analisis secara mendalam dan menarik kesimpulan tentang perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia (Miles & Huberman & Saldana, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum di Indonesia hingga saat ini masih problematika dalam penerapannya, karena berbagai persoalan substansi kurikulum, kebijakan kurikulum dan hasil riset yang menunjukkan kurikulum tersebut layak atau tidak layak diganti dengan kurikulum yang baru. Dalam pengembangan kurikulum di suatu negara setidaknya harus sesuai semangat dan prinsip kurikulum yaitu setiap teori kurikulum harus di mulai dengan perumusan (definisi) tentang rangkaian kejadian yang di cakup, setiap teori kurikulum harus mempunyai kejelasan tentang nilai-nilai dan sumber-sumber pangkal tolaknya, setiap teori kurikulum perlu menjelaskan karakteristik dari desain kurikulum, setiap teori kurikulum harus menggambarkan proses penentuan kurikulum serta interaksi diantara proses tersebut, setiap teori kurikulum hendaknya menyiapkan diri bagi proses penyempurnaan. Namun yang terjadi tidak semua prinsip tersebut dilakukan sehingga menyebabkan berbagai pandangan pada perubahan kurikulum di Indonesia.

1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Perkembangan kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan selama 11 kali perubahan dengan tujuan memenuhi target tujuan pendidikan nasional berdasarkan peta jalan pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Alhamuddin memaparkan bahwa "Ada ungkapan menggelitik yang acapkali muncul seiring perubahan penguasa negeri ini yakni 'ganti menteri ganti kurikulum', nyatanya dalam perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional memang telah berulang kali mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004, 2006 serta yang terbaru adalah kurikulum 2013". Ditambah, saat ini sudah ada pandangan baru terkait dengan kurikulum merdeka belajar (Alhamuddin, 2014; Pakpahan et al., 2023). Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, sistem kurikulum sebagai seperangkat rencana Pendidikan memang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di Masyarakat.

Adapun kurikulum itu sendiri, menurut Schubert (1986) memaparkan bahwa "*curriculum as content or subject matter, curriculum as a program of planned activities, curriculum as intended learning outcomes, curriculum as cultural reproduction, curriculum as experience, curriculum as discrete task and concepts, curriculum as an agenda for social reconstruction*". Pandangan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya, seperti Stratemeyer et al., (1947) yang menyatakan "*Curriculum currently defined in three ways; the courses and class activities in which children and youth engage; the total range of in class and out class experiences sponsored by school; and the total life experiences of the learner*". Dengan demikian, kurikulum dapat dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kehasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Lebih lanjut, Alhamuddin (2014) menjelaskan bahwa “Dari perspektif historis dari masa ke masa, determinan paradigma politik dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi secara kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini. Corak sistem Pendidikan suatu Negara pada gilirannya Kembali pada stakeholder yang paling berkuasa dalam pengambilan kebijakan. Pada tataran ini, maka sistem politiklah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa pada periode tertentu akan menggunakan kekuasaannya untuk menentukan apa dan bagaimana Pendidikan diselenggarakan. Kecenderungan inilah yang kemudian turut menjadi penguat pada apa yang kemudian disitilahkan ‘ganti menteri ganti kebijakan’, termasuk didalamnya kurikulum pendidikan, sebab muatanmuatan politis, value, ideologi, maupun tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan penguasa acapkali juga disetting sedemikian rupa dalam kerangka kurikulum”. Seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kurikulum Indonesia terus mengalami pergantian dari periode ke periode.

Kurikulum pada prinsipnya memang menjadi hal yang vital dalam dunia pendidikan. Dikarenakan vital atau pentingnya kurikulum ini, maka para di lapangan, para pendidik harus memahami kandungan kurikulum, karena telah jelas tujuan pendidikan terdapat dalam kurikulum. Sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan kondusif, interaktif, efektif dan lancar (Nasution, 1995).

Tabel 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Kurikulum	Landasan Kurikulum	Struktur Kurikulum
Kurikulum 1968 dan Sebelumnya (S. Wahyuni, 2016)	Kurikulum pertama di Indonesia setelah hari kemerdekaan adalah kurikulum 1947 (Rencana Pelajaran 1947) (Komaria, 1998; Tjahwa Kiong Hien, 1962)	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan 3 kolom tahun 1952 yaitu kelas, Contact-hour per minggu, dan bahan ajar dikembangkan untuk membangun karakter manusia Indonesia • Menerapkan lima kolom tahun 1953: Kelas, Jumlah Jam Kontak per minggu, Topik, Pelajaran, dan komentar • Tahun 1968, landasan pendidikan adalah Pancasila, tujuannya adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang menerapkan semangat Pancasila dan ketrampilannya
Kurikulum 1975, 1984, dan 1994	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Kurikulum 1975 sebagai pengganti Kurikulum 1968 berdasarkan Keputusan Menteri No.008d/U/1975 dan 008e/U1975 tanggal 15 Januari 1975	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan terpadu diadaptasi, dan filosofi strukturalisme dijadikan landasan kurikulum • Pendekatan struktural yang diterapkan pada Kurikulum 1975 belum berhasil, terutama jika dilihat dari kebutuhan siswa untuk memiliki kompetensi komunikatif • Kurikulum 1984 berorientasi pada tujuan pembelajaran, dan pembelajaran di kelas harus fungsional dan efektif. Pendekatan pengajarannya berpusat pada siswa melalui sistem pembelajaran aktif siswa (Cara Belajar Siswa Aktif—CBSA) untuk meningkatkan kompetensi komunikatif siswa • Kurikulum 1994 pendekatan berbasis makna, pendekatan komunikatif, dan sistem waktu pembelajaran diubah dari sistem semester menjadi sistem triwulan

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK, Kurikulum 2004)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah • Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti • Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 • format Kurikulum 2004, berdasarkan PP No. 25/2000 	<ul style="list-style-type: none"> • Sembilan yang tercakup dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi: Komunikasi yang efektif, Keterampilan Klinis Dasar, Penggunaan Ilmu Pengetahuan Dasar dalam Praktek, Diagnosis, Penatalaksanaan, dan Pencegahan, belajar sepanjang hayat; kesadaran diri, perawatan diri, dan pertumbuhan pribadi; konteks sosial dan komunitas dari layanan kesehatan; penalaran moral dan etika klinis; dan pemecahan masalah(S. R. Smith et al., 2003). • Tujuan pembelajaran (1) Learning to know, (2) learning to do, (3) learning to live together, and (4) learning to be(S. Wahyuni, 2016) • Empat komponen: (1) standar kompetensi, (2) kompetensi dasar, (3) materi pelajaran, dan (4) indikator ketercapaian(Chyung et al., 2006).
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP, Kurikulum 2006)	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang (UU) No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. • Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, termasuk dalam Pendidikan. • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan • Keputusan Menteri (MD) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (SI) • Keputusan Menteri (MD) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) • Keputusan Menteri (MD) No. 24 Tahun 2006 tentang Penerapan SI dan SKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada berbagai standar nasional Pendidikan: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar tenaga kependidikan, (5) fasilitas dan standar infrastruktur, (6) standar pengelolaan, (7) standar keuangan, dan (8) standar penilaian Pendidikan. • Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri atas (1) Tujuan Pendidikan Sekolah, (2) Struktur dan Isi Kurikulum, (3) Kalender Pendidikan, (4) Silabus, dan (5) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)(S. Wahyuni, 2016)
Kurikulum 2013	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional • PP. No 32 Tahun 2013 • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian nasional, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum 2013 adalah menghasilkan manusia Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan terpadu terhadap sikap, keterampilan, dan pengetahuan(Kelly, 2009; Maba, 2017). • Orientasi standardisasi kurikulum Indonesia menetapkan empat standar nasional pendidikan, yaitu standar hasil, isi, proses dan penilaian(Palupi, 2018).

	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti kurikulum 2013 dan kompetensi dasar mata pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah, • Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) (Palupi, 2018) 	
Kurikulum Merdeka	Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) (Sopiansyah et al., 2022)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep kurikulum Merdeka Belajar: 1) Pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil siswa Pancasila. 2) Fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu untuk pembelajaran mendalam terhadap kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3) Keleluasaan guru untuk melaksanakan pembelajaran yang berbeda-beda berdasarkan kemampuan siswa (Luthfi et al., 2023) • Enam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) menampilkan keberagaman global, (3) gotong royong, (4) kemandirian, (5) penalaran kritis, dan (6) kreativitas (Irawati et al., 2022; Sherly et al., 2021)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi reformasi kurikulum di Indonesia dilakukan setiap 4-5 tahun sekali, untuk mengetahui efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan Indonesia. Dalam perkembangan kurikulum Indonesia, kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang diterbitkan tahun 2020 dengan bertolak pada pembinaan pengetahuan, sikap dan keterampilan melalui program Merdeka belajar, guru penggerak dan program lainnya. Kemudian dalam pembelajarannya berfokus pada pembelajaran berbasis proyek baik sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas dan perguruan tinggi. Selanjutnya model-model pembelajaran yang digunakan yaitu Problem Based Learning Model, Project Based Learning Model, Inquiry Learning Model, Project Citizen Model. Selain itu, capaian pembelajaran untuk Tingkat sekolah berpedoman pada enam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu (1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) menampilkan keberagaman global, (3) gotong royong, (4) kemandirian, (5) penalaran kritis, dan (6) kreativitas. Dalam implementasinya di lakukan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi yang dapat dikembangkan dalam kurikulum berbasis anti korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran: Perilaku yang didasari pada upaya menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang selalu percaya pada perkataan, tindakan dan pekerjaan.
- b. Tanggung jawab: Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Kesederhanaan: Sikap dan perilaku yang bersahaja (tidak berlebihan).
- d. Kebebasan: Sikap dan perilaku yang menunjukkan kemandirian sesuai aturan.
- e. Integritas: Sikap dan perilaku yang menunjukkan memegang teguh prinsip kepemimpinan.
- f. Moralitas: Sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi etika dan nilai moral sebagai manusia.

2. Integrasi Kurikulum Berbasis Anti Korupsi pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi dapat memberikan pembinaan dan pendampingan pada karakter mahasiswa melalui pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan dalam mencegah korupsi di lingkungan pendidikan. Adapun beberapa tahapan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi, adalah sebagai berikut:

- a. Integrasi pembelajaran kontekstual dan pembelajaran nilai
Dalam konteks pendidikan anti korupsi, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan enam pendekatan:
 - 1) Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep penting dari mata pelajaran. Dalam hal ini, siswa terlibat dalam inkuiri untuk memecahkan masalah dengan mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai isi materi pelajaran. Pendekatan ini mencakup pengumpulan informasi terkait pertanyaan, mensintesis dan menyajikan penemuannya kepada orang lain.
 - 2) Pembelajaran berbasis proyek atau tugas terstruktur adalah pengajaran komprehensif dimana lingkungan belajar siswa (ruang kelas) dirancang agar siswa dapat melakukan inkuiri ke arah yang autentik, termasuk pendalaman materi pelajaran dan melakukan tugas-tugas bermakna lainnya. Pendekatan ini memungkinkan siswa bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksi pembelajarannya dan berpuncak pada produk nyata.
 - 3) Pembelajaran berbasis kerja adalah pendekatan pengajaran yang memungkinkan siswa menggunakan konteks tempat kerja untuk mempelajari materi pelajaran berbasis sekolah dan cara materi tersebut digunakan kembali di tempat kerja dan berbagai kegiatan diintegrasikan dengan materi pelajaran untuk kepentingan siswa.
 - 4) Pembelajaran layanan adalah penggunaan metodologi pengajaran yang mengintegrasikan layanan sosial dan struktur berbasis sekolah untuk mencerminkan layanan tersebut. Oleh karena itu, ditekankan pada korelasi antara pelayanan dan pembelajaran akademik. Dengan kata lain, pendekatan ini menyajikan penerapan praktis dari pengetahuan baru yang diperlukan dan berbagai keterampilan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proyek/tugas terstruktur dan kegiatan lainnya.
 - 5) Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan kelompok kecil untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.
 - 6) Pembelajaran nilai, seperti teknik klarifikasi nilai (analisis nilai, daftar nilai, permainan nilai).
- b. Mengembangkan bahan ajar pendidikan anti korupsi berbasis project
Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan format pendidikan antikorupsi yang diperuntukkan bagi mahasiswa di perguruan tinggi. Siswa belajar jujur, pekerja keras, disiplin, berani, bertanggung jawab, mandiri, sederhana, adil dan peduli. Sembilan nilai luhur tersebut diharapkan dapat membangun karakter antikorupsi. Komisi

Pemberantasan Korupsi menerbitkan modul Pendidikan Anti Korupsi. Modul mudah dipahami oleh siswa karena disajikan dengan bahasa yang sederhana. Modul pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi menekankan pada inovasi dan pengembangan bahan pembelajaran lain berupa komik, buku saku, film, dan papan permainan (boardgame) sehingga media ajar pembelajaran anti korupsi jadi lebih menarik dan variatif.

Tabel 2. Standar Kompetensi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi	Semester	Standar Kompetensi	Materi pokok dan sub pokok materi
Universitas	II dan IV	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menjelaskan arti kata dan definisi korupsi secara tepat dan benar; • Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan benar; • Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dengan benar; • Mahasiswa mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif; • Mahasiswa mampu menganalisis perbuatan korupsi dan perilaku koruptif di masyarakat; • Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi dan perilaku koruptif. 	Pengertian Korupsi: <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi definisi korupsi, • Bentuk-bentuk Korupsi, • Sejarah Korupsi,
		<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mampu menjelaskan factor pendorong terjadinya korupsi; • Mahasiswa dapat membedakan factor internal dan factor eksternal penyebab terjadinya korupsi; • Mahasiswa dapat menyimpulkan factor internal dan factor eksternal pendorong perilaku korup; • Mahasiswa mampu mengeliminir sikap diri sendiri yang cenderung mendorong perilaku korup; • Mahasiswa dapat menumbuhkan sikap anti korupsi. 	Faktor Penyebab Korupsi: <ul style="list-style-type: none"> • Faktor Penyebab Korupsi; • Penyebab Korupsi dalam Perspektif Teori; • Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi.
		<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa mengetahui akibat perbuatan korupsi; • Mahasiswa dapat memiliki empati pada korban korupsi; • Mahasiswa mampu menghindari perbuatan dan perilaku korupsi. 	Dampak masif korupsi: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak Ekonomi; • Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat; • Dampak Birokrasi Pemerintahan; • Dampak terhadap Politik dan Demokrasi; • Dampak terhadap Penegakan Hukum;

	<ul style="list-style-type: none">• Dampak terhadap Pertahanan dan Keamanan;• Dampak Kerusakan Lingkungan
<ul style="list-style-type: none">• Mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor internal penyebab terjadinya korupsi;• Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi yang berpedoman pada nilai-nilai anti korupsi untuk mengatasi faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi agar korupsi tidak terjadi;• Mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi dalam suatu organisasi/ institusi/ masyarakat untuk mencegah terjadinya korupsi dalam setiap kegiatannya.	Nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi: <ul style="list-style-type: none">• Nilai-Nilai Anti Korupsi;• Prinsip-Prinsip Anti Korupsi

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia mengalami pergantian sebanyak 11 kali perubahan dengan harapan dan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada sumber daya manusia baik pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Setiap pergantian kurikulum tetap mengacu tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Integrasi kurikulum berbasis anti korupsi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dapat digunakan berbagai model pembelajaran aktif berupa model problem based learning, model project based learning, model cooperative learning, model service learning, dan model value based learning. Selanjutnya nilai-nilai anti korupsi yang dapat di tanamkan kepada peserta didik adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kebebasan, integritas dan moralitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah memberikan dukungan dana sehingga proses pelaksanaan penelitian ini dapat di selesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Agustin, E. W. (2019). Development of Curriculum 2013 as an Effort to Improve the Quality of Education in Indonesia. 3rd International Conference on Current Issues in Education (ICCIE 2018), 178–182.
- Akib, E., Imran, M. E., Mahtari, S., Mahmud, M. R., Prawiyogy, A. G., Supriatna, I., & Ikhsan, M. T. H. (2020). Study on implementation of integrated curriculum in Indonesia. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research*, 1(1), 39–57.
- Alhamuddin, A. (2014). Sejarah Kurikulum di Indonesia (Studi Analisis Kebijakan Pengembangan Kurikulum). *Nur El-Islam*, 1(2), 48–58.
- Andrian, D., Kartowagiran, B., & Hadi, S. (2018). The Instrument Development to Evaluate Local Curriculum in Indonesia. *International Journal of Instruction*, 11(4), 921–934.

- Bullough Jr, R. V, Gitlin, A. D., & Goldstein, S. L. (1984). Ideology, teacher role, and resistance. *Teachers College Record*, 86(2), 339–358.
- Campbell-Phillips, S. (2020). Education and curriculum reform: The impact they have on learning. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 3(2), 1074–1082.
- Chyung, S. Y., Stepich, D., & Cox, D. (2006). Building a competency-based curriculum architecture to educate 21st-century business practitioners. *Journal of Education for Business*, 81(6), 307–314.
- Gunawan, I. (2017). Indonesian Curriculum 2013: Instructional management, obstacles faced by teachers in implementation and the way forward. *3rd International Conference on Education and Training (ICET 2017)*, 56–63.
- Irawati, D., Iqbal, A. M., Hasanah, A., & Arifin, B. S. (2022). Profil pelajar Pancasila sebagai upaya mewujudkan karakter bangsa. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1224–1238.
- Kelly, A. V. (2009). *The curriculum: Theory and practice*. Sage Publication.
- Komaria, O. (1998). *The history of English teaching in Indonesia*. Unpublished Thesis, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya.
- Lie, A. (2007). Education policy and EFL curriculum in Indonesia: Between the commitment to competence and the quest for higher test scores. *Teflin*, 18(1), 1–14.
- Luthfi, L. Y., Muliawati, T., & Zaqiah, Q. Y. (2023). Innovation in Curriculum: Merdeka Curriculum and its Implementation. *EDUTECH: Journal of Education And Technology*, 7(1), 101–112.
- Maba, W. (2017). Teacher's Perception on the Implementation of the Assessment Process in 2013 Curriculum. *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)*, 1(2), 1–9.
- Macdonald, J. B. (1971). Curriculum theory. *The Journal of Educational Research*, 64(5), 196–200.
- Miles & Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Translation by Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, A Methods Sourcebook.
- Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2022). Sustainability of Islamic Banking Human Resources Through the Formulation of an Islamic Accounting Curriculum for Higher Education: Indonesian Perspective. *SAGE Open*, 12(1). <https://doi.org/10.1177/21582440221079838>
- Mukminin, A., Habibi, A., Prasojo, L. D., Idi, A., & Hamidah, A. (2019). Curriculum reform in Indonesia: Moving from an exclusive to inclusive curriculum. *CEPS Journal*, 9(2), 53–72.
- Nasution, S. (1995). *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugraheni, A. S. (2015). Controversy a Policy Change in the Curriculum in Indonesia in Terms of the Point of View of Indonesian Language Subject. *Journal of Education and Practice*, 6(2), 53–61.
- OECD. (2023). *OECD Quarterly International Trade Statistics*. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [Online] Dapat Di Akses Pada https://www.oecd-ilibrary.org/trade/oecd-quarterly-international-trade-statistics/volume-2022/issue-4_5a1ef126-en.
- Pakpahan, H. M., Suherni, S., Pujiati, L., & Girsang, R. (2023). The Effectiveness of Indonesian Education Curriculum Reform on the Quality of Processes in Learning. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(1), 564–569.
- Palupi, D. (2018). What type of curriculum development models do we follow? An Indonesia's 2013 Curriculum Case. *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*, 6(2), 98–105.
- Parker, L. (2018). *The new curriculum in Indonesia*. Routledge International Handbook of Multicultural Education Research in Asia Pacific.
- Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., Sari, A. R., Sapulete, H., Solissa, E. M., & Sujana, I. G. (2023). Teacher's Paradigm in Interpreting the Birth of the Merdeka Curriculum Policy. *Journal of Education Research*, 4(2), 435–442.
- Ridha, S., & Kamil, P. A. (2021). The problems of teaching geospatial technology in developing countries: concepts, curriculum, and implementation in Indonesia. *Journal of Geography*, 120(2), 72–82.

- Rusdiman, A. B., Sitanggang, N., & Lubis, M. J. (2023). Problems Of Higher Education, Curriculum and Education In Indonesia. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4).
- Saud, U., & Johnston, M. (2006). Cross-cultural influences on teacher education reform: reflections on implementing the integrated curriculum in Indonesia. *Journal of Education for Teaching*, 32(1), 3–20.
- Schubert, W. H. (1986). *Curriculum: Perspective, paradigm, and possibility*. New York. McMillan Publishing Company.
- Sherly, S., Herman, H., Halim, F., Dharma, E., Purba, R., Sinaga, Y. K., & Tannuary, A. (2021). Sosialisasi implementasi program profil pelajar pancasila di smp swasta sultan agung pematangsiantar. *Jubaedah: Jurnal Pengabdian Dan Edukasi Sekolah (Indonesian Journal of Community Services and School Education)*, 1(3), 282–289.
- Smith, B. O., & Orlosky, D. E. (1975). *Socialization and Schooling: Basics of Reform*.
- Smith, S. R., Dollase, R. H., & Boss, J. A. (2003). Assessing students' performances in a competency-based curriculum. *Academic Medicine*, 78(1), 97–107.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.
- Stratemeyer, F. B., Forkner, H. L., & McKim, M. G. (1947). *Developing a curriculum for modern living*. Columbia: Bureau of Publication, Teacher College.
- Subkhan, E. (2019). Does Indonesian Curriculum Studies Exist. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 5(5), 406–420.
- Sudirman, S., & Haling, A. (2020). Mechanisms, problems, and strategies of teachers in implementing curriculum reform: A case study of Indonesian at elementary schools. *Proceedings of the First International Seminar on Language, Literature, Culture and Education, ISLLCE, 15-16 November 2019, Kendari, Indonesia*.
- Suyanto, S. (2017). A reflection on the implementation of a new curriculum in Indonesia: A crucial problem on school readiness. *AIP Conference Proceedings*, 1868(1).
- Tjahwa Kiong Hien. (1962). *English Language Instruction in Indonesia*. Unpublished Thesis for Sardjana Pendidikan, Malang: FKIP Universitas Airlangga Malang.
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum dari masa ke masa (telaah atas pentahapan kurikulum pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 10(2), 231–242.
- Wahyuni, S. (2016). Curriculum development in Indonesian context the historical perspectives and the implementation. *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan*, 10(01), 73–82.
- Widiyatmoko, A., & Shimizu, K. (2018). An overview of conceptual understanding in science education curriculum in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 983, 012044.